DOKTRIN PENENTUAN SAAT LAHIRNYA HUBUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI MEDIA INTERNET

WIDIYATNO , BANGKIT
Pembimbing : Prof. DR. AGUS YUDHA HERNOKO, SH., MH.
ELECTRONIC CONTRACT; INTERNET
KKB KK-2 THB 03 / 11 Wid d
Copyright© 2011 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAKSI

Perkembangan teknologi internet berpengaruh besar terhadap perilaku individu. Sebagai anggota masyarakat yang mengadakan hubungan hukum satu sama lain tak luput dari pengaruh perkembangan teknologi ini. Para pihak yang melakukan perbuatan hukum dalam suatu perdagangan, mengambil cara yang paling efisien dan praktis dengan menggunakan internet. Hubungan hukum antara para pihak yang tertuang dalam kontrak elektronik melalui internet, secara teknis melalui proses yang rumit dan menimbulkan persoalan hukum, antara lain : menentukan saat lahirnya hubungan hukum antara para pihak, keabsahan kontrak elektronik dan kekuatan pembuktian kontrak elektronik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu penelitian hukum dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum berupa peraturan peundang-undangan dan kajian buku-buku. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan *(statute approach)* dan Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach).* Sumber bahan hukum diperoleh dengan metode penelitian literatur *(library research).* Kesimpulan hasil penelitian ini dapat mengetahui bahwa saat lahirnya hubungan hukum dalam transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak terdapat dua kategori. Pertama, apabila kontrak elektronik diadakan melalui e-mail, maka penentuan saat lahirnya hubungan hukum tunduk pada teori pengiriman (*verzending theory).* Kedua, kontrak elektronik yang diadakan melalui clikwrap, maka penerapan teori penerimaan *(acceptance theory)* adalah tepat. Sedangkan keabsahan kontrak elektronik tunduk pada ketentuan yang diatur dalam *Burgeelijk Wetboek* (BW) terutama Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian. Kontrak elektronik yang ditandatangani secara digital dan dibuat sesuai prosedur yang ditentukan dalam UU ITE, merupakan alat bukti yang sah yang dapat diajukan ke pengadilan. Kontrak tersebut sah laksana kontrak yang ditandatangani secara manuskrip. Namun demikian kontrak elektronik yang telah memenuhi ketentuan yang sah tersebut bukan merupakan akta otentik, akan tetapi merupakan akta dibawah tangan. Para pihak yang akan membuat kontrak secara elektronik hendaknya mencantumkan klausul tentang kondisi tertentu yang dapat disepakati sebagai penentuan saat lahirnya hubungan hukum, menyepakati waktu pengiriman dan penerimaan dokumen kontrak serta menentukan sistem elektronik tertentu yang akan dipergunakan. Dalam menyusun regulasi, hendaknya pemerintah mempunyai pemahaman yang mendalam tentang kharateristik teknologi informasi, sehingga tidak terdapat loopholes yang dapat disiasati oleh salah satu pihak terkait dengan keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan pembuktian transaksi elektronik di muka Pengadilan.

Kata kunci : Kontrak elektronik, Transaksi Elektronik, Keabsahan kontrak elektronik.

ABSTRACT

THE DOCTRINE OF DETERMINATION DURING THE EMERSION OF LAW RELATED TO THE ELETRONIC TRANSACTION BY WAY OF INTERNET MEDIA

Bangkit Widiyatno

The Internet development in the world gives a lot of influence towards individual behavior. As the part of society which entered into relationships with the law among each other, we will not be escaped from the influence of this development. The parties who involve in legal action in the trading, take the most efficient and practical manner in using the internet. The legal action relationship among the parties decanted in the electronic agreement through internet technically passes through a complicated process and may cause legal problems such as the emersion of law correlation among the parties, the validity as well as the strength of the evidence of the electronic contract. This research is using the normative research type is law research by doing the study upon the law materials, such as the law and the regulations, and as well the law books. While the statue and conceptual approaches are used for the problems approach. The law resources are gathered based on library research. The result of this research concludes that during the doctrine emersion of legal aspects in electronic transaction which is showcased at the contract there will be two categories. First, if the contract has been made by email, therefore the doctrine determination of law emersion will follow the delivery law and regulation (verzening theory). Second, the electronic contract which is made through click wrap, so the legal aspect will base on the acceptance law and regulation (acceptance theory) is precise. While the validity of electronic contract is subject to the regulation which is arrange in Burgeeljik Wetbroke (BW) specially in the Verse 1320 BW about the law and regulation of the validity of the contract. Electronic contract is digitally signed and made according to the procedure based on the UU ITE, is legal evidence in the court. The contract is valid as valid as the contract which is in manuscript signature. However, the electronic contract is not an authentic deed, but as the "under the hand deed."
The parties who enter into electronic contract should mention a clause about such condition that agreed by both parties in determining when the emersion of the legal relationship, agreed the delivery and the time of receipt as well as the usage of such electronic system. During the compilation of regulation, the government should have the deep understanding about the information technology characteristic; therefore there will be no loopholes which in condition by one of the parties in relation with the validity of the electronic documents as valid evidence as proof of electronic transaction at the court.

Keywords: Electronic contract, electronic transaction, the validity of electronic trancastion.